

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA
SEMARANG
(ANALISIS BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun oleh :

SHELLA YULIA ROSALINA

131111060

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Shella Yulia Rosalina
NIM : 131111060
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Konsentrasi : Sosial
Judul : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
(Analisis Bimbingan Dan Penyuluhan Islam)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2018

Pembimbing.

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd

NIP. 197011291998032001

Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I

NIP. 198008162007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

SKRIPSI

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Dan Penyuluhan Islam)

Disusun Oleh:
Sheila Yulia Rosalina
131111060

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 24 juli 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Najahan Musyafik, M.A
NIP. 19701020 199503 1 001
Penguji III

Anila Elviriana, M. Pd
NIP. 19790427 200801 2 012

Sekretaris/Penguji II

Agus Riyadi, S.Sos, M.S.I
NIP. 1980081 6200710 1 003
Penguji IV

Sulistio, S. Ag., M.S.I
NIP. 19700202 199803 1 005

Mengetahui

Pembimbing I

Hj. Mahmudah, S.Ag., MPd
NIP. 197011 29199803 2 001

Pembimbing II

Agus Riyadi, S.Sos, M.S.I
NIP. 1980081 6200710 1 003



Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 06 Agustus 2018

Dr. H. Awaludin Pima, Lc., M. Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

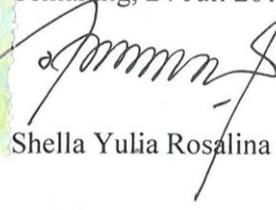
iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalamnya tulisan dan daftar pustaka.



Semarang, 24 Juli 2018


Shella Yulia Rosalina

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya : ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.s al-Maidah: 2). (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, 2002: 106).

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat sangat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat sangat miskin. Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2015 mencapai 8.027 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 28.044 jiwa. Sedangkan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Ngaliyan di tahun 2017 sebesar Rp. 732.000.000 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.408 keluarga penerima manfaat. Melihat kondisi yang terjadi di Kecamatan Ngaliyan dalam Program Keluarga Harapan cenderung sangat miskin, maka diperlukan adanya bantuan Program Keluarga Harapan agar keluarga sangat miskin tersebut dapat menjalankan atau melaksanakan dana dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang? 2. Bagaimana analisis bimbingan dan penyuluhan Islam terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut: 1). Target penetapan sasaran calon penerima PKH. 2). Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan 3). Proses persiapan pertemuan awal dan validasi 4). Penyaluran bantuan 5). Pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan 6). Verifikasi komitmen 7). Penangguhan dan pembatalan 8). Pemutakhiran data 9). Pengaduan peserta PKH. Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode individual dan kelompok, terbukti Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilihat dari tujuan dan fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam telah tercapai. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, meskipun pencapaiannya belum maksimal.

Kata Kunci: ***Pelaksanaan, PKH, Pengentasan, Kemiskinan, Bimbingan dan Penyuluhan Islam.***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN ABSTRAKSI	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II KERANGKA TEORI TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DAN KEMISKINAN.....	18
A. Bimbingan dan Penyuluhan Islam	18
1. Pengertian Penyuluhan Islam	18
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam	19
3. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam	20
4. Prinsip Bimbingan Penyuluhan Islam	21
B. Kerangka Teori Tentang Kemiskinan	22
1) Pengertian Kemiskinan.....	22

2) Bentuk-bentuk Kemiskinan	22
3) Faktor-faktor Kemiskinan	23
4) Ciri-ciri Kemiskinan.....	24
5) Dampak-dampak Kemiskinan	25
BAB III PROSES PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG.....	27
A. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.....	27
B. Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	32
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.....	36
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG	47
A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	47
B. Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	61
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	81
C. Kata Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Menurut Suryawati (2005: 122) kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Semarang Jawa Tengah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (Indra Kertati: 10 September 2017: pukul 11.23 WIB).

Program bantuan tunai bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) adalah

program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program perlindungan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,70 km², dan terbagi dalam 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan (Online. <http://Semarangkota.go.id/kondisiumum>. Diakses 12 September 2017 pukul 21.30 WIB). Data kemiskinan Kota Semarang sebanyak 367.848 jiwa atau 114.939 kepala keluarga (KK) masuk dalam kategori miskin. Angka ini sudah melalui *verifikasi* dan *identifikasi* pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas warga yang masuk dalam kategori sangat miskin. Sementara jumlah penduduk Kota Semarang dari data Dispendukcapil mencapai 1.767.086 jiwa. Dengan demikian, diperoleh prosentase warga miskin sebesar 20,82 persen dari total warga Semarang. Data base warga miskin tahun 2015 ini telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/-2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan warga miskin Kota Semarang 2015. (Okezone:12 September 2017 pukul 22.40 WIB).

Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2015 mencapai 8.027 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 28.044 jiwa (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang: 2015). Sedangkan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Ngaliyan di tahun 2017 sebesar Rp. 732.000.000 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.408 keluarga penerima manfaat. (Operator PKH Kota Semarang).

Melihat kondisi yang terjadi di Kecamatan Ngaliyan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) cenderung sangat miskin. Maka diperlukan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar keluarga sangat miskin tersebut

dapat menjalankan atau melaksanakan dana dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, seperti halnya menyekolahkan anaknya dan mengutamakan kesehatannya. Realita yang ada di Kecamatan Ngaliyan keluarga sangat miskin menyalahgunakan uang dan tidak memperdulikan pendidikan dan kesehatan. Maka perlu adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga sangat miskin terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah diimplementasikannya, namun demikian hasil belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kecamatan Ngaliyan. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat *multidimensional*. *Multidimensional* merupakan situasi yang dialami oleh suatu bangsa dimana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan juga kebobrokan moral.

Program Keluarga Harapan (PKH) ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Kemensos RI, 2015: 12).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. (Kemensos RI, 2015: 2). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga sangat miskin (KSM)

berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya (Kemensos RI, 2015: 12).

Keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) disebut rumah tangga sangat miskin (RTSM), adapun alasan untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup dan tidak mampu membiayai perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan (Wawancara peserta PKH, tanggal 7 Maret 2017).

Dana anggaran yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang mencapai Rp. 6.112.410.000 setiap tahunnya (Solotrust: 13 Oktober 2017: Pukul 10.59 WIB). Untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana, misalnya uang bantuan buat kesalon, shopping, dan lain sebagainya itu bukan menjadi harapan atau tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi hak sepenuhnya bagi sasaran untuk merubah berbagai permasalahan hidup yang dialaminya, agar tidak terjadi penyimpangan dibantu kelembagaan yang mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada level Nasional dibentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat), sampai pada level Kabupaten terdapat Tim Koordinasi dan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Kabupaten. Pada level Kecamatan Unit

pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Pendamping Program Keluarga Harapan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, maka hal tersebut termasuk dalam bimbingan penyuluhan kepada peserta Program Keluarga Harapan agar peserta Program Keluarga Harapan dapat mendapatkan hak-haknya yang diberikan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan.

Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi kehidupan secara mandiri. Peserta Program Keluarga Harapan merupakan orang miskin yang hidupnya dibawah rata-rata. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, maka program tersebut untuk membimbing warga miskin yang pendidikanya lemah dan standar kesehatanya tidak diperhatikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut dengan memberikan bantuan secara non tunai dan pemberian bekal dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bantuan non tunai tersebut guna membantu pembiayaan sekolah dan jaminan kesehatan. Sedangkan pembelajaran keahlian dibekali keterampilan seperti pembuatan tas, daur ulang dari plastik bekas bungkus kopi, pembuatan snack-snak ringan, dan pembuatan pernak-pernik lainnya. Dan juga peserta Program Keluarga Harapan di bekal cara memasarkanya produk-produk yang dibuatnya agar produk yang dibuatnya itu terus berkembang dan dapat mandiri. Dengan adanya Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak bergantung dengan bantuan non tunai karena sudah dibekali keahlian tersebut.

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peserta diberi bimbingan

penyuluhan agar program berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan adanya bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan, agar merubah gaya hidup mereka yang semula menjadi miskin lama kelamaan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi harapan pemerintah yang sebenarnya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, problem Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai ikatan erat dengan dakwah. Berbicara problem dan upaya pengentasan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga, maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah. Dengan dakwah dapat diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan dimasa sekarang dan yang akan datang (Umari, 1980: 52). Demikian pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemiskinan, karena masih banyak anggota keluarga sangat miskin tidak memperhatikan atau memperdulikan dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :*"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan dan Penyuluhan Islam)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ?
2. Bagaimana analisis bimbingan dan penyuluhan Islam terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk analisis bimbingan dan penyuluhan Islam terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

Manfaat dari segi teoritis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pengembangan keilmuan bimbingan dan penyuluhan Islam pada khususnya dan ilmu dakwah pada umumnya yang berhubungan dalam rangka mengetahui kondisi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Manfaat dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terkait dengan pengentasan kemiskinan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan PKH didaerah lain yang mengalami fenomena yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi pengandaan atau duplikasi dan juga menjawab kesiapan penulis tentang bahan-bahan yang akan diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Evi Fitriah tahun 2010 dengan judul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang*". Penelitian ini

merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif ini menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya sudah berjalan secara maksimal, dengan adanya perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat penerima bantuan. Rumah tangga sangat miskin di Kecamatan Padarincang sebagian sudah mulai menunjukkan adanya perubahan pola pikir dimana rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima bantuan sudah mulai mau menyekolahkan anak-anak mereka sampai dengan tingkat SLTP. Mereka juga sudah mulai mau melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan janin dan balita ketempat kesehatan seperti posyandu bagi sebagian rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anak balita.

Kedua, penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Muhammad Rafiudin tahun 2016 dengan judul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulannya secara umum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam tidak bisa diterima atau difahami oleh semua pihak masyarakat, karena sosialisasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saja, pendataan dalam menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan terstruktur akan tetapi pendataan tersebut tidak

tepat sasaran, maka dari itu perlu adanya pendataan ulang sehingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak salah sasaran.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Puspitasari tahun 2013 dengan judul “*Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu petugas Program Keluarga Harapan (PKH) bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tentang prosedur yang harus dilalui, validasi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan motivasi kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pengawasan dan pendampingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi tahun 2016 dengan judul “*Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (Studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”. Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana dampak kebijakan Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) pada Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan keberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam penetapan RTS, dimana penerima PKH di Kecamatan Gunung Sugih adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan karakteristik meliputi: jumlah penerima PKH yang memiliki rumah dari dinding kayu/bambu 48,32%, rumah dengan bata merah kualitas rendah 51,68%,

penerima berprofesi buruh 50,14%, petani 42,95%, serta pekerjaan lainnya 6,91%.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Panji tahun 2009 dengan judul *“Program Keluarga Harapan Sebagai Pilihan Kebijakan dalam Mengatasi Hambatan Akses Terhadap Pendidikan Dasar (Studi Kasus Penyelenggara Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cilinci 2007-2008)*. Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengatakan bahwa pendamping bertugas mengawal dilapangan dan harus benar-benar kapabel berintegritas moral tinggi. Terlebih dalam menjalankan tugasnya mereka digaji oleh negara dengan besaran yang relatif memadai. Pendamping yang direkrut dari masyarakat harus menjadi pengaman aliran dana intensif seorang kreator dan inovator untuk kemajuan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus lebih banyak pendamping yang diterjunkan, agar program berjalan seimbang dengan keinginan pendamping dan masyarakat. Posisi pendamping sangat vital untuk keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan fakta membuktikan program intervensi yang menggelontorkan uang tunai kepada masyarakat berpotensi tidak efektif jika tidak dibarengi pengawasan ketat.

Dari beberapa judul penelitian di atas terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) belum ada satupun penelitian terdahulu yang mendiskripsikan keadaan sosial ekonomi penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Ngaliyan serta objek penelitian penulis berbeda dengan objek penelitian-penelitian terdahulu serta pendekatan penulis menggunakan analisis bimbingan dan penyuluhan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilanjutkan, dengan judul skripsi: *“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan dan Penyuluhan Islam)”*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah (Moloeng, 2004: 6).

Deskripsi adalah bentuk pernyataan yang memuat pengetahuan ilmiah, bercorak deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai bentuk, susunan, peranan, dan hal-hal yang terperinci. Disebut penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998: 5).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena data-data yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima Program Keluarga Harapan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012: 5) data ialah bahan yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta sehingga dapat memberi manfaat bagi peneliti atau memberi gambaran kepada peneliti tentang kondisi atau suatu keadaan. Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda

nyata, sesuatu abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam penelitian ini kajian dan pembahasan berdasarkan pada dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (Arikunto, 1998: 102). Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari koordinator, pendamping dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian (Azwar, 1998: 91). Data sekunder didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2014: 225), sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku, riview, literature, dokumentasi, penelitian atau sumber lain yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (Sutrisno, 2004: 136), yaitu:

a. Interview

Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan, dan *terwawancara* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2007: 186). Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap beberapa penerima manfaat di Kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang untuk mengetahui hasil setelah mendapatkan bimbingan dari pendamping Program Keluarga Harapan dan melakukan wawancara kepada koordinator serta pendamping untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan salah satu teknik yang sangat sederhana dan tidak memerlukan keahlian yang luar biasa. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode observasi berperan serta atau pengamatan terlibat, yaitu pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang-orang yang diteliti dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan yang biasa, rutin dan alamiah (Mulyana, 2002: 167). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung dilokasi penelitian yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people) (Arikunto, 2010: 135). Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi, dokumentasi bisa tertulis maupun lainnya yang bisa memberikan informasi

tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu. Secara faktual dan cermat menggambarkan ke dalam atau status fenomena (Moloeng, 2001: 231-232).

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh terkumpul, proses data *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai, berarti data itu dipilih-pilih (Sugiyono, 2012: 92).

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah yang harus diikuti selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2012: 95).

c. Data *Conclusion drawing* (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Banyak ahli kualitatif mengajukan tahapan teknik analisis kualitatif dengan berbagai pendekatan dan metode sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing dan sesuai dengan model serta tujuan penelitian yang dilakukan (Herdiansyah, 2010: 163). Pada dasarnya dan pada prinsipnya semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian adalah suatu cara untuk menyusun dan mengolah hasil penelitian dari data dan bahan yang disusun menurut urutan tertentu sehingga menjadi susunan penelitian. Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, inti dan bagian akhir.

Bab pertama pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua memuat landasan teori, yang berisi: kajian tentang bimbingan dan penyuluhan Islam dan Teori Kemiskinan, meliputi: pengertian bimbingan, fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam, tujuan bimbingan dan penyuluhan Islam dan prinsip-prinsip bimbingan dan penyuluhan Islam, kedua

pengertian kemiskinan meliputi: bentuk-bentuk kemiskinan, faktor-faktor kemiskinan, ciri-ciri kemiskinan dan dampak-dampak kemiskinan.

Bab ketiga merupakan bab penyajian data, yang berisi: gambaran umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari sejarah berdirinya Program Keluarga Harapan, dasar dan tujuan Program Keluarga Harapan, struktur organisasi Program Keluarga Harapan, dan sarana dan prasarana PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang; kondisi sosial ekonomi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang terdiri dari: Kondisi sosial ekonomi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang; Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Analisis Bimbingan dan penyuluhan Islam terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi Kesimpulan hasil penelitian, saran-saran sebagai rekomendasi yang didasari pada temuan penelitian dan kata penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI TENTANG BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DAN KEMISKINAN

A. Bimbingan dan Penyuluhan Islam

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam

Secara etimologi istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan masa mendatang. (Arifin, 1994: 1).

Prayitno mengemukakan, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 2002: 99).

Menurut Willis, bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana, dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut sehubungan dengan masalahnya. (Agus Riyadi, 2013: 70-71).

Berdasarkan pengertian bimbingan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan atau untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi untuk mencapai pribadi yang lebih baik.

Kemudian pengertian penyuluh secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian

penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar *suluh* yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan. Penyuluhan dapat berarti penerangan tentang sesuatu. (Arifin, 2009: 49).

Menurut Walgito, penyuluhan adalah bantuan yang diberikan individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan langsung berhadapan muka dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 1989: 5).

Winkel mendefinisikan, bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai konsep dirinya dan tuntutan lingkungan (Winkel, 1991: 27).

Sedangkan menurut Setiana, penyuluhan merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana. L, 2005: 57).

Beberapa pengertian bimbingan dan penyuluhan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya dengan cara melalui sesuatu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok sehingga mendapatkan kehidupan dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta mampu bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam

Tujuan bimbingan penyuluhan Islam menurut Faqih (2000: 36-37) terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khususnya adalah membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

Sedangkan fungsi bimbingan penyuluhan Islam menurut Musnamar (1992: 34) meliputi: *preventif* yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya, *Kuratif* atau *korektif* yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya, *Preservatif*, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali), dan *Developmental* atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya. (Musnamar, 2009: 52).

3. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam

Metode merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan, karena kata metode berasal dari meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. Dalam bimbingan dan penyuluhan dapat dikatakan sebagai suatu cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan penyuluhan, yakni:

a. Metode bimbingan individual

Merupakan salah satu teknik bimbingan melalui upaya pemberian bantuan yang diberikan secara individual dan langsung bertatap muka (berkomunikasi) antara penyuluh dengan klien.

- b. Metode bimbingan kelompok yang dikenal dengan bimbingan “*Group guidance*”

Cara ini membawa klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok (beberapa klien) atau bersifat individu atau perorangan, yakni masalah yang disarankan oleh individu sebagai anggota kelompok.

4. Prinsip Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menurut Mubarak, prinsip menjadi pegangan didalam proses bimbingan dan penyuluhan. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Setiap individu adalah makhluk yang dinamis dengan kelainan-kelainan kepribadian yang bersifat individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar.
- b. Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari dua faktor yaitu pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar.
- c. Setiap individual adalah organisasi yang berkembang atau tumbuh, ia adalah dalam keadaan selalu berubah, perkembangannya dapat di bimbing kearah pola hidup yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.
- d. Setiap individu dapat memperoleh keuntungan pilihan pemberian bantuan dalam hal melakkan kehidupan yang sukses.
- e. Setiap individu harus diberi hak yang sama serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama.
- f. Setiap individu memiliki fitrah (kemampuan dasar) beragama yang dapat berkembang dengan baik bilamana diberi kesempatan untuk melalui bimbingan yang baik.
- g. Konseling agama harus dilakukan sebagai pekerjaan ibadah yang dikerjakan semata-mata mengharap ridho Allah Swt.
- h. Proses pemberian penyuluhan harus sejalan dengan tuntunan syari’at Islam (Mubarak, 2002: 76-77).

B. Kerangka Teori tentang Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi (keadaan) dimana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. (BAPPENAS, 1993: 3).

Menurut Chambers sebagaimana dikutip oleh Nasikun, bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- a. Kemiskinan (*pover*);
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*);
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*);
- d. Ketergantungan (*dependence*);
- e. Keterasingan (*isolation*) baik secara grafis maupun sosiologis

2. Bentuk-bentuk kemiskinan

Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Bentuk-bentuk kemiskinan menurut Nasikun dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan;
- b. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar;

- c. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

3. Faktor-faktor kemiskinan

Adapun faktor kemiskinan menurut Kuncoro dilihat dari sisi ekonomi disebabkan tiga hal, yakni sebagai berikut:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurse yang dikutip oleh Kuncoro mengemukakan, bahwa negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*: proses kemiskinan yang dilestarikan, diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan;
- b. *Socio-economic dualism*: negara ekskoloni mengalami mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor;
- c. *Population growth*: perspektif yang didasari pada teori malthus bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedang pertumbuhan pangan seperti deret hitung;
- d. *Resources management and the environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti management pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas;
- e. *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus;
- f. *The Marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan, karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki;
- g. *Culture and ethnic factors*: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan. (Nasikun, 2012: 259-261).

4. Ciri-ciri kemiskinan

Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2005: 133) sebagai berikut: Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang pangan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti

(Kesehatan, Pendidikan, Sanitasi, Air bersih, Transportasi), ketiadaan jaminan masa depan (karna tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam, ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti: (Anak terlantar, Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

5. Dampak-dampak Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari suatu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat kemiskinan:

- a. Banyaknya pengangguran;
- b. Terciptanya perilaku kekerasan, ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan;

- c. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan;
- d. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (Mubyarto, 1999: 20).

BAB III
PROSES PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN
NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Sejarah Berdirinya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. (Kemensos RI, 2015: 12).

Berdasarkan wawancara dengan koordinator Program Keluarga Harapan mengemukakan, bahwa Program Keluarga Harapan masuk di Kecamatan Ngaliyan sejak tahun 2013. Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai lembaga pengentasan kemiskinan sekaligus pembangunan kebijakan dibidang sosial.

Penduduk Kecamatan Ngaliyan sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dan pekerja serabutan, sedangkan selain sektor buruh, penduduk Kecamatan Ngaliyan juga bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan jasa. Pada awalnya masyarakat miskin di Kecamatan Ngaliyan sebelum adanya Program Keluarga Harapan (PKH) hidupnya sangatlah prihatin, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan sangat tidak diperhatikan, karna faktor ekonomi. Banyak orang tua yang keberatan terhadap biaya sekolah menjadikan anak tidak dapat meneruskan sekolahnya.

Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan sebanyak 2 orang yang terdiri dari koordinator data yang bertugas melakukan pengelolaan dan pengiriman data hasil validasi calon peserta, hasil verifikasi komitmen dan hasil pemutakhiran kepesertaan serta realisasi penyaluran bantuan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendamping bertugas menyiapkan data dan undangan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH), melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan waktu, menyiapkan fasilitas tempat pertemuan dan sarana yang diperlukan dan membuat daftar hadir pertemuan. (Dokumentasi Profil PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2018).

2. Dasar dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program bantuan Tunai bersyarat atau yang disebut dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT), yang telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang dihadapi Negara-negara yang melaksanakan CCT.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama atau bukan merupakan lanjutan dari program bersubsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung saat ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin yang mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) disini bermaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan program bantuan bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian-pencapaian tujuan pembangunan Millenium (*Millenim Development Goals/ MDGs*). Sedangkan Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan yaitu didirikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Ngaliyan Kota Semarang adalah Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan.

Maka, dengan adanya tujuan Program Keluarga Harapan tersebut peserta Program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Ngaliyan diharapkan mampu memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan,

pangan dan gizi, termasuk juga menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

3. Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mempunyai tugas masing-masing dalam mendampingi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh sebab itu, disusunlah struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ialah sebagai berikut:

NO	Nama	JABATAN
1.	Risma Anik Mahmudah, S.I.Kom	Koordinator dan Pendamping Kec. Ngaliyan
2.	Rini Setyowati, Am.Keb	Pendamping PKH Kec. Ngaliyan

Sumber data: Dokumentasi papan organisasi PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Koordinator maupun Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan tugas dan tanggungjawab Koordinator Kecamatan ialah:

1. Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PKH;
2. Koordinasi rutin terhadap partisipasi Kecamatan terkait dalam pelaksanaan PKH. (Pedoman Pelaksanaan PKH: 44).

Sedangkan tugas Pendamping PKH ditingkat Kecamatan meliputi:

1. Tugas Persiapan Program. Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan pertama, yang terdiri dari:
 - a. Sosialisasi PKH tingkat kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH.
2. Tugas Rutin Pendamping PKH, meliputi:
 - a. Melakukan pemutaakhiran data;
 - b. Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH;
 - c. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi;
 - d. Melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen;
 - e. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat.
3. Tugas Pencatatan dan Pelaporan.
 - a. Tugas pencatatan. Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sarannya.
 - b. Tugas pelaporan. Rencana dan realisasi kegiatan pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH Kabupaten atau Kota secara rutin tiap bulan. (Buku Pendamping dan Operator PKH: 12-19).

4. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menjadi acuan mendasar yang dapat menjamin mutu dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sarana dan prasana tersebut adalah:

- a. Kantor kesekretariatan yang berada di Kecamatan Ngaliyan;

- b. Komputerisasi (laptop, komputer, spiker, printer, scanner, LCD (*Liquid Crystal Display*)) sebagai alat pendukung dalam penyampaian materi *family devolepment session* (FDS);
- c. Stiker, spidol, papan tulis, modul, buku pintar. (Wawancara dengan Ibu Rini, pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)".

B. Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kondisi sosial penerima manfaat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebelum tersentuh Program Keluarga Harapan menunjukkan keadaan yang masih jauh dari kehidupan yang layak, khususnya di dalam hal pendidikan dan kesehatan. Pada umumnya kepala keluarga berprofesi sebagai kuli serabutan, seperti halnya menjadi tukang sampah, buruh cuci, tambal ban, penjual jajanan anak-anak keliling dan lain sebagainya, sehingga keadaan tersebut berdampak terhadap penghasilan yang tidak menentu perbulanya. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Sesuai dengan pernyataan Ibu Rumiati (pengangkut sampah) yang merupakan salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beliau mengatakan:

“Dulu sebelum saya mendapatkan bantuan ini, saya merasa susah mbak untuk membelikan baju seragam sekolah baru untuk anakku, apalagi sepatu dan buku-buku untuk sekolah mbak, seragam sekolah untuk anakku selalu meminta-minta bekas dari tetangga-tetangga. Karena penghasilan suamiku yang tidak cukup untuk membeli perlengkapan sekolah, karena suamiku hanya bekerja sebagai pengangkut sampah di pasar dan gajinya-pun yang didapat tidak seberapa hanya cukup untuk makan tiap harinya. Tetapi, setelah saya terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan, *Alhamdulillah* mbak bisa membelikan seragam sekolah yang baru buat anakku sama buku dan sepatu tidak harus meminta-minta dari tetangga lagi. Jadi, penghasilan suamiku bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang saya dapat dari Program Keluarga Harapan (PKH) saya

tabung untuk biaya sekolah anakku agar dia mendapatkan pendidikan sekolah sesuai aturan di PKH”. (Wawancara dengan penerima bantuan, Ibu Rumiwati tanggal 5 Maret 2017 pukul 16.30 WIB).

Hal serupa juga telah diutarakan oleh Ibu Wagirah (pengangkat sayur) yang mengatakan:

“Sekarang saya sudah bisa membelikan sepatu anakku yang bagus karena bantuan dari PKH, karena saya sebagai kuli pengangkat sayuran di pasar dengan pendapatan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya bantuan dari PKH ini, saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah untuk anakku yang sekarang duduk dibangku SMP kelas 2”. (Wawancara dengan penerima bantuan, Ibu Wagirah tanggal 7 Maret 2017 pukul 18.30 WIB).

Pernyataan berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Sugiarti (buruh cuci) mengenai bantuan PKH yaitu:

“Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari PKH ini mbak, dengan bantuan ini anak saya dapat melanjutkan sekolahnya lagi yang dulu sempat terputus waktu kelas 4 SD karena keterbatasan biaya sekolah. Dengan pekerjaan buruh cuci saya tidak bisa membiayai hidup sehari-hari dan membiayai biaya sekolah anak. *Alhamdulillah*, dengan adanya bantuan dari PKH hidup saya terbantu untuk sehari-hari dan bisa menyekolahkan anakku. (Wawancara dengan penerima bantuan, Ibu Sugiarti tanggal 10 Maret 2017 pukul 12.30 WIB).

Ibu Tasriyatun menjelaskan bahwa beliau menjadi buruh cuci bertujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena menganggap biaya hidup masih kurang. Hal ini sesuai pernyataan beliau:

“Penghasilan suamiku tidak cukup untuk biaya sekolahnya anakku. Anak saya dua (2), laki-laki dan perempuan, tinggal satu yang masih duduk dibangku sekolah dan yang satu sudah tamat SMA, dulu anak-anaku sepulang sekolah biasanya ngamen untuk memenuhi biaya sekolahnya. Kini anakku yang sudah tamat SMA ingin sekali masuk kuliah (Perguruan Tinggi), uang yang saya dapat dari buruh cuci saya tabungkan untuk biaya mendaftarkan kuliah anak saya. Saya pun bekerja tidak setiap hari mbak, hanya kalau mendapatkan panggilan saya baru kerja, kalau tidak ada panggilan saya dirumah. Pendapatan ngamen anak saya juga tidak menentu kadang banyak kadang sedikit yang didapatkan. Gaji suami

saya dan pendapatan ngamen setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Dan *alhamdulillah*-nya mbak dengan bantuan dari PKH, biaya pendidikan anak-anakku terjamin meskipun masih ngamen setiap pulang sekolahnya. (Wawancara dengan penerima bantuan, Ibu Tasriyatun tanggal 23 Maret 2017 pukul 19.30 WIB).

Berbeda dengan Ibu Tasriyatun yang sebelumnya mengaku berprofesi sebagai buruh cuci yang mengambil langkah untuk menutupi kekurangan ekonominya dengan mengambil andil untuk bekerja membantu suaminya, lain halnya dengan Ibu Wagirah yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu sekali mbak dengan adanya bantuan dari PKH ini, karena pada saat saya hamil sampai melahirkan, semua biaya pemeriksaan ditanggung oleh PKH. Dan setelah anak saya lahir saya mendapatkan bantuan yang saya gunakan untuk membeli susu anak dan perlengkapan bayi. Karena pendapatan suami saya yang hanya pas-pasan dan saya juga serumah dengan mertua dan adik ipar suami saya mbak. Jadi gaji suamiku hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja”. (Wawancara dengan penerima bantuan, Ibu Wagirah tanggal 25 Maret 2017 pukul 18.30 WIB).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) mengalami peningkatan secara berangsur-angsur. Terbukti dengan kondisi sosial peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini mengalami perubahan dibidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang lebih layak. Mengingat bahwa pendidikan, ekonomi dan kesehatan merupakan aspek penting bagi kehidupan yang harus terpenuhi secara optimal sehingga manusia dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Kementrian sosial menyusun Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, dimana pendidikan dan kesehatan yang menjadi aspek penting yang dapat menolong masyarakat dari jerat kemiskinan. Sesuai slogan Program Keluarga Harapan (PKH) “Saya Boleh

Miskin Tapi Anak Saya Harus Sehat dan Cerdas”. Pendidikan merupakan senjata bangsa untuk bisa bersaing di era globalisasi yang menuntut terintegrasinya seluruh aspek kesejahteraan dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan oleh Kementrian Sosial untuk menyoroti dunia pendidikan Indonesia sebagai inti dari Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kecamatan Ngaliyan sendiri telah menunjukkan grafik terbanyak nomer tiga tingkat kemiskinan yang ada di lingkungan Kota Semarang. Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan masyarakat mengalami kepedulianya terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan-nya.

Wajib belajar sembilan tahun merupakan kewajiban setiap anak yang berhak mengenyam pendidikan secara Nasional, seharusnya pelaksanaannya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang merupakan ketentuan dari pemberian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat Kecamatan Ngaliyan atas pentingnya wajib belajar sembilan tahun mengantarkan masyarakat Kecamatan Ngaliyan ke kehidupan yang sejahtera dimasa yang akan datang. Seluruh kesadaran dari masyarakat tidak terlepas dari pendekatan moral para pekerja sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri untuk menyelamatkan Indonesia dari belenggu kemiskinan.

Beberapa pernyataan dari para informan di atas, penulis menggambarkan secara nyata tentang pengaruh pembinaan keluarga miskin yang sangat membantu secara ekonomi dari seluruh proses kehidupan masyarakat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Selain itu, telah terlahir kembali semangat menuntut ilmu dari para orang tua untuk anak-anak mereka agar bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas dan bermartabat. Hal ini menepis segala diskriminasi pendidikan atas anak-anak yang berasal dari keluarga yang sangat miskin yang kini banyak menghantui para anak-anak yang terancam putus sekolah. Oleh sebab itu, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil menyelamatkan anak-anak

yang terancam putus sekolah secara finansial dengan melaksanakan sekolah gratis selama sembilan tahun bagi seluruh anak di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Sama pentingnya dengan pendidikan, kesehatan juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kesehatan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan diperkirakan menjadi penyebab tidak terselamatkannya masyarakat cerdas sehingga bangsa akan kehilangan orang-orang yang berpotensi untuk mengantarkan Indonesia untuk berpartisipasi didunia global.

Terpenuhinya aspek kesehatan diliputi oleh beberapa hal, diantaranya pelayanan yang menghemat biaya dalam pelaksanaannya serta pelayanan yang menghemat waktu dan mudah disentuh oleh masyarakat tanpa membedakan strata sosial. Hal inilah yang melatarbelakangi terciptanya pelayanan kesehatan secara gratis oleh Kementerian Sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Pelayanan kesehatan yang layak telah dirasakan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanpa biaya yang mahal dan mudah dalam pelayanannya. Salah satunya, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin dan berkala ke Puskesmas yang tersedia.

C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut:

1. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil atau menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang;

2. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/ MI sederajat, SMP/ MTS sederajat dan atau SMA/ MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang;
3. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat di dalam keluarga peserta PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasinya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktifitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya pada bantuan atau pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya (Sumber: Pedoman Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015);
4. Dan memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria:
 - a. Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi;
 - b. Dan lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH. (Pedoman Pelaksanaan PKH: 15-16).

Kemudian, secara teknis kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan Kementerian dan Lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan berdasarkan peraturan dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Dipabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Inpres Nomor 1 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke-46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga. (Pedoman Pelaksanaan PKH: 12-13).

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ialah sebagai berikut:

1. Proses Penetapan Sasaran (*Targeting*)

Dalam rangka pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri

Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah 6 tahun, anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan beberapa pendamping Program Keluarga Harapan yang berada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Seperti yang disampaikan oleh pendamping yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

“Dalam rangka penetapan peserta Program Keluarga Harapan ini pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Semarang, akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang berada di Kecamatan harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)”.

2. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan

Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Aldo sebagai koordinator PKH di tingkatan Kota Semarang, yakni:

“Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini pertama itu pembentukan Tim koordinasi PKH di tingkatan Kota Semarang setelah itu malakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Kota Semarang, kepada aparat pemerintah dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosialisasi akan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di tingkatan masing-masing Kecamatan yang berada di Kota Semarang”. (Wawancara dengan Bapak Aldo sebagai koordinator PKH di tingkatan Kota Semarang tanggal 10 Januari 2018).

3. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

Setelah penetapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan.

“Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran PKH itu diberikan kepada penerima manfaat. (Wawancara dengan Ibu Rini, pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018).

4. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan (PKH). Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

“Disini kami sebagai pendamping PKH ketika ingin menyalurkan uang dari pemerintah ke tangan peserta, kita para pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, jadi jikalau pada waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing untuk menghindari penumpukan antrian, sebelum itu, pendamping juga berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan dana tersebut pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu. (Wawancara dengan Ibu Rini sebagai pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 5 Januari 2018)”.

Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tidak hanya berupa uang akan tetapi pemerintah juga memberikan ketrampilan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Risma (Koordinator PKH Kecamatan Ngaliyan) sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, penerima manfaat itu tidak melulu menerima bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga membekali ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka-mereka itu dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, pemberian ketrampilan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Ketrampilan-ketrampilan itu seperti membuat krupuk bawang, donat dan daur ulang plastik bekas menjadi tas. Untuk mempermudah pelatihan ketrampilan peserta PKH dibuat berkelompok, atau kelompoknya terdiri dari sepuluh sampai limabelas orang. Adapun tempat prakteknya kita setuju bersama-sama kelompok untuk menempati rumahnya peserta secara bergantian. Modal dari pelatihan itu, peserta harus iuran per masing-masing peserta, ketika sudah terbentuk seperti PKH Kecamatan Ngaliyan membuat ketrampilan kerupuk bawang selanjutnya di bekali cara memasarkanya agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung pada uang pemerintah. Kemudian, pelatihan itu sendiri dilakukan setiap dua minggu sekali. (Wawancara dengan Ibu Risma koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan. (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 15 Januari 2018).

5. Pembentukan Kelompok Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh program. Mekanisme

pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar cepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan itu sendiri ada ketua, sekretaris dan bendahara, biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)”.

6. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

“Kalau untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan, keluarga yang masih duduk dibangku sekolah kami pantau disekolahnya setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinannya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan jika dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat. Itulah pengawalan yang dilakukan pendamping PKH mbak agar peserta PKH dapat

mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh PKH (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)”.

7. Penangguhan dan Pembatalan

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini ialah sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan;
- e. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan
- f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
 1. Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi

- 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut;
2. Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
 3. Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program.

8. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal;
- b. Kelahiran anggota keluarga;
- c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya);
- d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah;
- e. Ibu hamil;
- f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen;
- g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili);
- h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- i. Perubahan variabel sinergitas program

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait. Seperti yang dikatakan Ibu rini sebagai pendamping Program Keluarga Harapan, yakni:

“PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi, data yang asalnya 20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapatkan PKH hanya nenek saja. Jika, suatu saat neneknya

meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan PKH yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dan juga PKH selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal dll (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018).

9. Pengaduan Peserta PKH

Pengaduan adalah mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat baik peserta PKH maupun non peserta PKH untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pengaduan menjadi salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). (PKH, 2016: 36).

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEISKINAN DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai.

Program adalah seperangkat proyek-proyek yang terkoordinir. Sehingga proyek adalah unit terkecil dari suatu kegiatan. Dengan demikian, proyek adalah bagian dari program. Dalam program berbagai kegiatan diatur dari berbagai sudut, seperti kapan dilaksanakan, dan bagaimana hubungan atau koordinasi dari kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek itu. (Kadariah, 2007: 23). Maka dari itu, program PKH ialah memberikan peluang yang lebih baik dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Berdasarkan surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 1293 tahun 2016 tentang Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah, PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Salahsatunya di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Setelah menerima bantuan tunai dari PKH Kecamatan Ngaliyan,

aspek kesehatan, ekonomi serta pendidikan mengalami perubahan, dan tentunya akan berangsur-angsur membaik.

Perubahan tersebut dapat dilihat pada penerima manfaat sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan ini. Penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan uang saja, tetapi juga mendapatkan bimbingan ketrampilan. Ketrampilan tersebut diberikan kepada penerima manfaat agar dapat hidup mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk detail pelaksanaan program PKH tersebut, menurut Pedoman PKH (2015: 33) ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukannya, yakni:

1. Penetapan sasaran;
2. Persiapan daerah;
3. Pertemuan awal dan validasi;
4. Penyaluran bantuan;
5. Pemebeentukan kelompok peserta PKH;
6. Verivikasi komitmen;
7. Penanguhan dan pembatalan;
8. Pemutaakhiran data;
9. Dan terakhir pengaduan.

Program Keluarga Harapan terbagi atas dua komponen, yakni PKH kesehatan dan PKH pendidikan. Pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah atau penyelenggara Paket A, B dan C sangat diharapkan peran aktifnya dalam menarik kembali anak-anak RTSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Komponen kesehatan yaitu diverivikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan ke Puskesmas terdekat atau jaringannya.

Kemudian, proses implementasi Program Keluarga Harapan itu sendiri dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara terperinci terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

1. Target penetapan sasaran calon penerima PKH.

Penetapan sasaran calon penerima PKH berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial No. 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH, 2015: 2). Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan yakni, Ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah 6 tahun, anak berusia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yakni dengan Ibu Rini, Ia menjelaskan mekanisme penetapan Program Keluarga Harapan ini dengan cara, jika pengurus PKH sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Pihak PKH tidak asal menerima data tersebut begitu saja, namun pendamping yang berada di Kecamatan mencocokkan kembali data tersebut dengan pesertanya langsung, agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

(Wawancara dengan Ibu Rini, pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018).

2. Penetapan lokasi calon penerima bantuan PKH

Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan PKH dilakukan melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan PKH pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan. Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan. (Pedoman Pelaksanaan PKH: 33).

Setelah peneliti mewancarai salah satu koordinator PKH, yakni dengan Bapak Aldo sebagai koordinator PKH di tingkatan Kota Semarang, ia menjelaskannya: “Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, pertama pembentukan Tim koordinasi PKH di tingkatan Kota Semarang, setelah itu melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Kota Semarang kepada aparat pemerintah di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosialisasi akan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di tingkatan masing-masing Kecamatan yang berada di Kota Semarang. (Wawancara dengan Bapak Aldo sebagai koordinator PKH di tingkatan Kota Semarang tanggal 10 Januari 2018).

Setelah tahap penentuan lokasi didapatkan, langkah berikutnya yakni persiapan pertemuan awal dan validasi peserta calon penerima bantuan PKH.

3. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH.

Setelah penetapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta PKH. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pendamping PKH, yakni dengan Ibu Rini di Kecamatan Ngliyan Kota Semarang, Ia menjelaskan sebagaimana berikut: “Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada penerima manfaat (Wawancara dengan Ibu Rini, pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)”.

Setelah langkah demi langkah pendataan penerima bantuan dana PKH sudah didapatkan oleh pihak PKH, langkah selanjutnya ialah penyaluran bantuan dana PKH.

4. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH.

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh

lembaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rinin berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan dana PKH ialah sebagai berikut: Pendamping PKH ketika hendak menyalurkan dana bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak Bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, jadi kalo pada waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing, maka hal demikian untuk menghindari penumpukan antrian di Bank dan sebelum itu juga pendamping berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan bantuan dana tersebut, pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di Bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu. (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 5 Januari 2018).

Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tidak hanya berupa bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga memberikan bantuan ketrampilan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Risma (Koordinator PKH Kecamatan Ngaliyan), yakni sebagai berikut: “Penerima manfaat itu tidak melulu menerima bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga membekali

ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri, oleh karena itu, pemberian ketrampilan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya, ketrampilan-ketrampilan itu seperti membuat krupuk bawang, donat dan daur ulang plastik bekas menjadi tas.

Kemudian untuk mempermudah pelatihan ketrampilan peserta PKH dibuat berkelompok, atau kelompoknya terdiri dari sepuluh sampai limabelas orang. Adapun tempat prakteknya kita setuju bersama-sama kelompok untuk menempati rumahnya peserta secara bergantian. Modal dari pelatihan itu peserta harus iuran per masing-masing peserta, ketika sudah terbentuk seperti PKH Kecamatan Ngaliyan membuat ketrampilan kerupuk bawang selanjutnya di bekali cara memasarkannya agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung pada uang pemerintah. Kemudian, pelatihan itu sendiri dilakukan setiap dua minggu sekali.

Mengenai besar kecilnya bantuan dana PKH, berikut penulis paparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I, Indeks dan Komponen Bantuan BKH.¹

NO	SKEMA BANTUAN	INDEKS BANTUAN PER-KSM/TAHUN
	Bantuan Tetap PKH:	Rp. 500.000, 00
1.	Bantuan Komponen PKH: Ibu Hamil, Menyusui, Nifas, Balita, Anak Pra Sekolah	Rp. 100.000, 00
2.	Anak SD dan yang Sederajat	Rp. 450.000, 00
3.	Anak SMP dan yang Sederajat	Rp. 750.000, 00

¹ Catatan: Bantuan komponen kesehatan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak balita tetapi menjadi satu paket dengan Ibu hamil atau nifas.

4.	Anak SMA dan yang Sederajat	Rp. 1000.000, 00
5.	Bantuan Minimum per KSM	Rp. 950.000, 00
6.	Bantuan Maksimum per KSM	Rp. 3.700.000, 00

Sumber: (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH, 2015: 4).

Kemudian bagaimana cara menghitung nilai bantuan PKH. Nilai bantuan yang diterima oleh peserta PKH untuk setiap tahunnya didasarkan pada jumlah komponen yang dimilikinya. Tabel berikut ini merupakan contoh perhitungan nilai bantuan yang akan diterima peserta PKH dalam satu tahunnya.

Tabel II: Contoh perhitungan nilai bantuan pertahun berdasarkan komponen.²

No	BANTUAN TETAP	BUMIL/ NIFAS/ BALITA	ANAK SD	ANAK SMP	ANAK SMA	TOTAL BANTUAN
1.	500.000	1.000.000	450.000	750.000	1.000.000	3.700.000
2.	500.000	1.000.000	450.000	750.000	-	2.700.000
3.	500.000	1.000.000	450.000	-	-	1.950.000
4.	500.000	1.000.000	-	750.000	1.000.000	3.250.000
5.	500.000	1.000.000	-	750.000	-	2.250.000
6.	500.000	1.000.000	450.000	-	1.000.000	2.950.000
7.	500.000	1.000.000	-	-	1.000.000	2.500.000
8.	500.000	-	450.000	750.000	1.000.000	2.700.000

² 1. Skema nilai bantuan di atas untuk peserta PKH yang memiliki satu komponen PKH; 2. Apabila anggota peserta PKH melampaui jumlah yang disyaratkan sebagaimana tabel diatas, maka jumlah bantuan maksimal yang diperoleh adalah. Rp. 3.700.000, 00, pertahun.

9.	500.000	-	450.000	750.000	-	1.700.000
10.	500.000	-	450.000	-	-	950.000
11.	500.000	-	-	750.000	1.000.000	2.250.000
12.	500.000	-	-	750.000	-	1.250.000
13.	500.000	-	450.000	-	1.000.000	1.950.000
14.	500.000	-	-	-	1.000.000	1.500.000

Sumber: (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH, 2015: 6).

Kemudian terakhir, berikut penulis cantumkan nilai bantuan minimal dan maksimal pada tiap tahapan penyaluran PKH:

Tabel III, Indeks bantuan minimal Rp. 950.000, 00/ tahun.

URAIAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Bantuan Komponen	112.500	112.500	112.500	112.500
Bantuan Tetap	-	500.000	-	-
Jumlah Diterima	112.500	612.000	112.500	112.500

Sumber: (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH, 2015: 6).

Tabel IV, Indeks bantuan Maksimal Rp. 3.700.000,00/ tahun

URAIAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Bantuan Komponen	800.000	800.000	800.000	800.000
Bantuan Tetap	-	500.000	-	-
Jumlah	800.000	1.300.000	800.000	800.000

Diterima				
-----------------	--	--	--	--

Sumber: (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH, 2015: 6).

Langkah berikutnya ialah pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan.

5. Pembentukan kelompok peserta PKH.

Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjangkau kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Yakni menurut penuturan Ibu Rinin, bahwa untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara

terbuka dan sukarelawan. (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)”.

6. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah. Khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rini menjelaskan, bahwa: untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang masih duduk dibangku sekolah kami pantau disekolahnya, setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan kepada guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinannya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat. (Wawancara dengan Ibu

Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018”.

Kemudian dilanjutkan dengan penanggulangan dan pembatalan peserta PKH.

7. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ialah sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan;
- e. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan
- f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan

kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:

1. Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut;
2. Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
3. Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program. (PKH, 2016: 36-37).

8. Pemutaakhiran data peserta PKH

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal;
- b. Kelahiran anggota keluarga;
- c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya);
- d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah;
- e. Ibu hamil;
- f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen;
- g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili);
- h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- i. Perubahan variabel sinergitas program. (PKH, 2016: 37).

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan

bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rini, berkaitan dengan pemutaakhiran data ialah, bahwa PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi data yang asalnya 20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapat PKH hanya nenek saja. Jika, suatu saat neneknya meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan PKH yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dan juga PKH selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal dll. (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018).

9. Pengaduan peserta PKH

Menurut pedoman umum PKH (2015: 78) menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta PKH maupun pihak luar, seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun apabila permasalahan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka

pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadakan permasalahan menggunakan form pengaduan (formulir C-2) yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat. (PKH, 2016: 38).

B. Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi (keadaan) dimana seseorang mengalami kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. (BAPPENAS, 1993: 3).

Adapun ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2005: 133) ialah Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang dan pangan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti (Kesehatan, Pendidikan, Sanitasi, Air bersih dan Transportasi), ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam, ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial, seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga “KDRT”, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah menggulirkan beberapa program perlindungan sosial yang diambil sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Program unggulan yang di klaim pemerintah, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dengan tujuan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan.

Terkait dengan bimbingan, Prayitno mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. (Prayitno, 2002: 99). Kemudian, penyuluhan menurut Walgito adalah bantuan yang diberikan individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan langsung berhadapan muka, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 1989: 5). Sementara Winkel mendefinisikan, bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, dan memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai konsep dirinya dan tuntunan lingkungan. (Winkel, 1991: 27).

Sedangkan Penyuluhan merupakan ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. (Setiana. L, 2005: 57).

Beberapa pengertian bimbingan dan penyuluhan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya dengan cara melalui sesuatu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok sehingga mendapatkan kehidupan dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta mampu bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Bimbingan dan Penyuluhan Islam proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan dalam hidupnya dengan cara melalui sesuatu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok sehingga mendapatkan kehidupan dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta mampu bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain. Artinya bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah bantuan untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan dapat berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi maupun kelompok melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari hasil penelitian ini, pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang didasarkan pada kebutuhan penerima manfaat PKH Kecamatan Ngaliyan. Hal ini dilakukan agar kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam yang diberikan dapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi penerima manfaat PKH itu sendiri. Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilaksanakan secara terprogram, terarah, teratur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap penerima manfaat PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pendamping atau penyuluh PKH harus senantiasa menjalin kerjasama dengan semua pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan. Hal ini dimaksudkan agar pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengalami kemudahan dalam melaksanakan tugas Bimbingan dan Penyuluhan. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara umum meliputi pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar penerima manfaat, baik untuk pendidikan maupun kesehatan dapat membantu penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Sedangkan untuk materi PKH yang ada di Kecamatan Ngaliyan ialah: Pertama: (modul pendidikan) meliputi, menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar, dan membantu anak sukses di sekolah; kedua: (modul ekonomi) meliputi, mengelola keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung dan memulai usaha; ketiga (modul kesehatan) meliputi, seribu hari pertama kehidupan, sesi anak dan balita dan higinitas, sanitasi dan penyakit; keempat: (modul perlindungan anak) meliputi, pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak; kelima: (modul perlindungan disabilitas) meliputi, perlindungan penyandang disabilitas; keenam: (modul kesejahteraan lansia) meliputi, kesejahteraan lansia (modul kegiatan implementasi).

Sebagai pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan, pendamping harus mengetahui dan memahami tentang metode dan teknik dalam bimbingan dan penyuluhan itu sendiri. Tanpa pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai metode dan teknik, pendamping akan banyak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan. Selain itu, metode dan teknik yang

digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Seperti yang penulis kemukakan di atas, hendaknya dari masing-masing kegiatan yang dijalankan ada penanggung jawab dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui hasil dari pelaksanaannya dan menjadi bahan rujukan untuk kegiatan selanjutnya, dan adanya pelaksanaan Pimbingan dan Penyuluhan dapat membantu penerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam menaggulangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan pendampingan dan pengawasan oleh pendamping PKH tersebut. Karena pada pelaksanaannya, monitoring sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendampingan yang dijalankan oleh pendamping PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Terkait dengan metode Penyuluhan, ada tiga metode yang diterapkan oleh pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yakni:

1. Metode partisipatif, artinya bahwa seorang penyuluh atau pendamping tidak menggurui, mengindoktrinasi, tetapi memfasilitasi penerima manfaat sehingga penerima manfaat dapat berperan secara aktif berada ditengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh;
2. Metode dialog interaktif, artinya bahwa seorang tenaga pendamping atau penyuluh menerangkan saja, tetapi kepada audience diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi;
3. Metode pemberdayaan, artinya bahwa seorang tenaga penyuluh atau pendamping harus bisa melihat, mengamati potensi sumber dan daya yang dimiliki penerima manfaat sehingga penyuluh dapat menjadi fasilitator untuk bersama-sama penerima manfaat dapat mendayagunakan potensi dan sumber

yang dimiliki untuk penanggulangan masalah bersama yang dihadapi guna terwujudnya kesejahteraan bersama.

Dari ketiga metode penyuluhan di atas, yang diterapkan oleh PKH Kecamatan Ngaliyan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Prayitno, bahwa bimbingan penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 2004: 99).

Untuk mendukung dan memecahkan masalah kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang PKH dalam pelaksanaannya menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan perorangan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh terhadap penerima manfaat PKH dengan pendekatan individu. Pendekatan individu ini dilakukan karena memang masing-masing setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Dengan cara ini, kontak antara seorang penyuluh atau pendamping dengan penerima manfaat lebih intensif dan setiap masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat dapat diatasi dan dipecahkan sehingga penerima manfaat dengan sukarela atau terbuka menerima masukan atau arahan dari penyuluh.

Penyuluh atau pendamping PKH Kecamatan Ngaliyan dalam membangun hubungan dengan penerima manfaat, yakni dengan cara individual partisipasi interaktif. Pihak pendamping berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan, semisal dengan pihak puskesmas setempat bagi ibu hamil, pihak sekolah bagi anak-anak penerima manfaat, dan lain sebagainya. Hal ini

bertujuan agar pihak penerima manfaat tetap dalam kontrol dari pendamping atau penyuluh agar supaya mereka (penerima manfaat) mengalokasikan dana sesuai dengan fungsinya. Untuk menjalin hubungan antara pendamping dengan penerima manfaat, Ibu Rini menjelaskan, pada pertemuan awal PKH Kecamatan Ngaliyan mengumpulkan semua peserta PKH untuk diberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan manfaat dari PKH (Wawancara dengan Ibu Rini, tanggal 2 Januari 2018).

2. Melakukan penyuluhan secara kelompok.

Penyuluhan secara kelompok dilakukan dengan cara atau pendekatan kelompok ini lebih mempermudah bagi seorang penyuluh. Adapun metode yang digunakan seorang penyuluh yaitu dengan cara ceramah. Untuk mengatasi masalah yang dialami oleh penerima manfaat, pihak pendamping selalu melakukan kontrol, baik dengan penerima manfaat (individu maupun kelompok) maupun dengan puskesmas, posyandu dan rumah sakit (dalam bidang kesehatan); pihak sekolahan (dalam bidang pendidikan) dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar penerima manfaat dapat memberikan informasi, baik keluhan maupun lainnya terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan. Kemudian jika suatu saat ada pengaduan, maka pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukannya.

Selain itu, untuk mempermudah pendamping dalam menjalin hubungan dengan penerima manfaat. Pihak PKH Kecamatan Ngaliyan membentuk kelompok penerima manfaat, yakni dengan cara: untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Biasanya satu

kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan (Wawancara dengan Ibu Rini pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 2 Januari 2018)”.

Tidak hanya itu, terkait dengan pemberdayaan penerima manfaat, pihak pendamping PKH Kecamatan Ngaliyan juga memfasilitasi peserta penerima manfaat diberikan ketrampilan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Risma: Penerima manfaat itu tidak melulu menerima bantuan uang saja, akan tetapi pemerintah juga membekali ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, pemberian ketrampilan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya, ketrampilan-ketrampilan itu seperti membuat krupuk bawang, donat dan daur ulang plastik bekas menjadi tas (Wawancara dengan Ibu Risma koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, tanggal 3 Januari 2018).

Dari pemaparan penulis di atas, terkait dengan bimbingan penyuluhan Islam, baik dengan cara individu maupun kelompok dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bahwa penyuluh atau pendamping PKH sudah berupaya semaksimal mungkin. Artinya dalam jangka pendek maupun panjang, manfaat PKH adalah sebagai berikut: 1. Dalam jangka pendek: yaitu memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin; 2. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RSTM melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) dan memberikan kepastian akan masa depannya (*insurance effect*); 3. Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, dan

kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain) dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada sekolah); 4. Mengurangi pekerja anak bekerja di jalanan, serta mencegah RSTM menjadi tuna sosial; 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui *complementary* perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (*supply side*), pengembangan sistem perlindungan masyarakat sangat miskin (*demand side*), sekaligus penguatan *desentralisasi*, dan 6. Percepatan pencapaian MDGs melalui indikator kemiskinan pendidikan, ibu hamil, pengurangan kematian balita dan lain sebagainya (Rahayu, 2012: 53).

Setelah mendapatkan bantuan dana dari Program Keluarga Harapan, aspek ekonomi bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) mengalami peningkatan secara berangsur-angsur. Terbukti dengan kondisi sosial ekonomi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini mengalami perubahan, sehingga mereka hidup lebih layak. Jika melihat keberhasilan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan mengacu pada fungsi bimbingan penyuluhan Islam menurut Musnamar (1992:34) yang meliputi *Preventif*, *Kuratif* atau *Korektif*, *Preservatif* dan *Developmental* dapat penulis jelaskan di bawah ini:

Pertama *preventif*, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Rumiati setelah menerima bantuan dari PKH ia dan keluarganya tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, semisal membelikan baju seragam sekolah, sepatu, dan perlengkapan sekolah. Oleh sebab itu, langkah PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan ini hanya bersifat *preventif* atau pencegahan dan bukan untuk pengobatan. Demikian pula yang dirasakan oleh Ibu Wagirah yang bekerja sebagai buruh cuci. Kedua *Kuratif* atau *korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya. Penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang, dilihat dari teori *korektif* sangat membantu, salah satunya pernyataan dari Ibu Tasriyatun yang memiliki 2 anak (laki-laki dan perempuan), sebelum ia terdaftar dan menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan, ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, karena suaminya berpenghasilan rendah. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini dapat memecahkan masalah dalam keluarganya. Ketiga teori *Preservatif*, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali). Agar Ibu Tasriyatun yang bekerja sebagai buruh cuci dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, uang hasil dari ia bekerja dikumpulkan untuk biaya pendidikan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hal ini tentunya agar keluarga Ibu Tasriyatun tidak kembali dalam keadaan yang serba kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Keempat teori *Developmental* atau pengembangan yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya. Terkait dengan *developmental* atau pengembangan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Rini (Koordinator PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang), bahwa penerima manfaat itu tidak hanya melulu menerima bantuan uang saja, tetapi pemerintah juga membekali ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka dapat hidup mandiri (Musnamar, 2009: 52).

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan selain memberikan bantuan berupa uang kepada penerima manfaat. Pemerintah juga memberikan ketrampilan seperti membuat makanan ringan (krupuk bawang dan donat), daur ulang plastik diolah menjadi tas agar penerima manfaat dapat memperbaiki perekonomiannya dan hidup mandiri. Dengan adanya pemberian ketrampilan tersebut maka perlu adanya bimbingan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada individu

maupun kelompok dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta mampu bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan penyuluhan sangatlah penting untuk membimbing seseorang ke jalan yang benar. Berdasarkan data dari KEMENSOS RI (kementerian sosial Republik Indonesia) masyarakat miskin di Kecamatan Ngaliyan berada di peringkat ke tiga di lingkungan Kota Semarang.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. (Kemensos RI, 2015:2). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga sangat miskin (KSM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya (Kemensos RI, 2015: 12).

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis dengan menggunakan pendekatan individual maupun kelompok, apa yang telah dicapai oleh Pihak PKH dalam langkah *preventif*, *kuratif*, *preservatif*, dan *developmental* sudah terlaksana sesuai dengan SOP PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam upaya pengentasan kemiskinan, meskipun pencapaiannya belum sempurna.

Kemudian jika dikaitkan dengan tujuan bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri, menurut Faqih (2000: 36-37) terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khususnya adalah membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan tujuan umumnya, yakni untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan adanya bantuan dari PKH tentunya dapat membantu masalah-masalah yang dihadapinya, baik dalam sektor kesehatan maupun pendidikan. Karena, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini, bagi Ibu Hamil, semua biaya, mulai dari awal hingga akhir dibiayai oleh PKH, peserta penerima manfaat yang belum menyelesaikan pendidikan dengan adanya bantuan dapat melanjutkan pendidikannya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menggambarkan pencapaian kebahagiaan hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PKH, yakni untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah prilaku RSTM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya, terkait dengan tujuan khusus, yakni dengan membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain oleh PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sedikit demi sedikit dapat terlaksana.

Untuk pencapaian kebahagiaan di akhirat, tentunya tidak lepas dari kondisi ketika di dunia itu sendiri, dalam artian jika seseorang dalam kondisi ekonomi yang baik, dan berpendidikan tentunya dapat menghantarkan

kebahagiaan di akhirat kelak. Namun, Jika dilihat dari tujuan PKH secara khusus yaitu terdiri dari:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RSTM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RSTM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RSTM dan
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RSTM. (Pedoman PKH: 12).

Kemudian terkait dengan prinsip bimbingan dan penyuluhan Islam yang menjadi pegangan didalam proses bimbingan dan penyuluhan Islam ialah sebagai berikut:

- a. Setiap individu adalah makhluk yang dinamis dengan kelainan-kelainan kepribadian yang bersifat individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar.
- b. Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari dua faktor yaitu pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar.
- c. Setiap individual adalah organisasi yang berkembang atau tumbuh, ia adalah dalam keadaan selalu berubah, perkembangannya dapat di bimbing kearah pola hidup yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.
- d. Setiap individu dapat memperoleh keuntungan pilihan pemberian bantuan dalam hal melakkan kehidupan yang sukses.
- e. Setiap individu harus diberi hak sama serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama.
- f. Setiap individu memiliki fitrah (kemampuan dasar) beragama yang dapat berkembang dengan baik bilamana diberi kesempatan untuk melalui bimbingan yang baik.

- g. Konseling agama harus dilakukan sebagai pekerjaan ibadah yang dikerjakan semata-mata mengharap ridho Allah Swt.
- h. Proses pemberian penyuluhan harus sejalan dengan tuntunan syari'at Islam (Mubarok, 2002: 76-77).

Setelah penulis menguraikan prinsip bimbingan dan penyuluhan Islam yang menjadi pegangan didalam proses bimbingan dan penyuluhan Islam. Kemudian penulis melihat dari aspek keberhasilan penyuluh atau pendamping PKH terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Adapun aspek keberhasilan Program Keluarga Harapan terhadap kehidupan keluarga sangat miskin di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok

Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan dan papan. Keluarga sangat miskin (KSM) masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki pekerjaan, karena pendapatan yang mereka peroleh tidak cukup untuk memenuhi semuanya. Dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh PKH.

Bantuan PKH hanya diberikan kepada mereka yang hamil dan anak balita untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka dan pada anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka.

2. Peningkatan kualitas kesehatan

Program Keluarga Harapan dikatakan berpengaruh terhadap kesehatan keluarga sangat miskin, karena PKH memberikan bantuan bagi ibu hamil dan balita untuk membantu memenuhi gizi mereka. Dan dengan adanya persyaratan untuk pemeriksaan rutin, maka kesehatan mereka dapat lebih

terbantu, karena mereka juga semakin rajin memeriksakan kandungan dan juga balita mereka ke tempat yang telah disediakan. Selain itu mereka memperoleh kemudahan untuk memeriksakan diri dan keluarga mereka jika ada yang sakit tanpa khawatir dengan biaya pengobatan. Dengan demikian kualitas kesehatan dari keluarga sangat miskin dapat meningkat.

3. Pemenuhan pendidikan dasar bagi anak

Program Keluarga Harapan juga berdampak terhadap terpenuhinya pendidikan dasar bagi anak-anak RTSM peserta PKH. Setelah adanya program ini maka anak-anak dari keluarga sangat miskin bisa melanjutkan sekolah mereka tanpa terkendala dengan biaya sekolah dan perlengkapan sekolah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang KSM peserta PKH di atas yang memiliki anak yang dulunya putus sekolah karena keterbatasan biaya, menganggur akhirnya memutuskan kembali menyekolahkan anaknya tersebut.

Bahkan anak-anak KSM juga semakin rajin sekolah, ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit, Program Keluarga Harapan dapat membuahkan kesadaran para KSM akan pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan yang cukup diharapkan anak-anak mereka dapat menjadi anak yang cerdas dan mampu memperoleh peluang kerja yang lebih baik.

Jika dirinci lebih lanjut, bahwa perlunya bimbingan penyuluhan Islam itu dapat dijelaskan dalam urutan berikut: manusia memiliki unsur jasmaniyah (biologis), dan psikologis atau mental (ruhaniyah), manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan sebagai makhluk Tuhan yang religius.

1. Segi jasmaniyah (Biologis)

Karena manusia memiliki unsur jasmaniyah atau biologis, maka manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, semisal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniyah ini dapat dilakukan manusia selaras

dengan ketentuan Allah Swt, bisa pula tidak, dan penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk dari Allah Swt itu bisa dilakukan manusia secara sadar maupun tidak.

Keyakinan bahwa ketentuan dan petunjuk Allah Swt pasti akan membawa kebahagiaan. Individu maupun kelompok yang berbahagia tentulah mereka yang mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt tersebut. Termasuk dalam usahanya memenuhi kebutuhan jasmaniyah. Tetapi tidak semua manusia mampu hidup dan memenuhi kebutuhan jasmaniyahnya itu, baik karena faktor internal maupun eksternal atau karena lingkungan sekitarnya (Musnamar, 2009: 14). Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat: 155-156, yakni:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

Artinya: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila orang-orang yang ditimpa musibah mereka mengucapkan “Innalillahi wainna ilaihi raji’un” sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaanyalah kami kembali. (Qs. Al-Baqarah: 155-156).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya merupakan suatu yang wajar terjadi dihadapi oleh manusia sebagai sesuatu yang berada dalam situasi dan kondisi lingkungan yang bisa juga karena ulah tangan manusia. Mengingat manusia membutuhkan pemenuhan hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt, maka diperlukan adanya Bimbingan Penyuluhan Islam, agar dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmaninya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt.

2. Dari segi ruhaniyah (psikologis)

Sesuai dengan hakikatnya, manusia memerlukan pula pemenuhan kebutuhan ruhaniyah dalam arti psikologistik. Seperti telah diketahui, bahwa manusia dianugerahi kemampuan ruhaniyah, pendengaran, penglihatan dan kalbu, atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan kemampuan cita, rasa dan karsa. Secara luas untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik (selaras dan seimbang).

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyeru kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s Yusuf: 53).

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan penyululan Islam diperlukan untuk membentuk manusia dalam memenuhi kebutuhan psikologinya dan dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt termasuk mengatasi kondidi psikologis yang membuat seseorang menjadi berada dalam keadaan tidak selaras.

3. Dari sudut individu

Manusia merupakan makhluk individu, dengan kata lain keadaan orang per-orang mencakup keadaan jasmaniyah dan ruhaniyah atau psikologisnya bisa membawanya ke kehidupan yang tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. Ketidaknormalan sosok jasmaniyah, dapat membawa manusia ke kehidupan yang tidak selaras.

4. Dari segi sosial

Sealin sebagai makhluk individual, manusia juga termasuk makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan kemasyarakatan. Semakin modern kehidupan manusia, semakin kompleks tatanan kehidupan yang harus dihadapi manusia. Manusia dapat saling memaksakan kehendak, bertikai, bahkan berperang dan saling membunuh.

5. Dari segi agama

Agama merupakan wahyu Allah, wahyu Allah itu benar, tetapi dalam penafsirannya bisa terjadi banyak perbedaan antara berbagai ulama sehingga muncul masalah-masalah khilafiyah. Hal ini kerap terjadi tidak hanya menimbulkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang yang dapat menggoyahkan kehidupan dan keimanannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan penyuluhan Islam (keagamaan) yang memberikan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yakni: 1. Target penetapan sasaran calon penerima PKH (*targeting*). Pemilihan peserta Program Keluarga Harapan atau penerima manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 2. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan. Penetapan lokasi Kabupaten atau Kota berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui surat keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan. 3. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi. Setelah penetapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). 4. Penyaluran Bantuan. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan komponen kepesertaan. 5. Pembentukan Kelompok Peserta Program Keluarga Harapan. Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. 6. Verifikasi Komitmen. Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringanya untuk komponen kesehatan dan khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang

disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun. 7. Penangguhan dan Pembatalan. Penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ialah sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan dan peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut), namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan;
- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).
- e. Peserta Program Keluarga Harapan yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan;
- f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program.

8. Pemutakhiran data. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. 9. Pengaduan peserta PKH. Pengaduan ialah mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat baik peserta PKH maupun non peserta PKH untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2. Program PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, hal ini ditunjukkan, bahwa metode yang ditempuh oleh pendamping ialah dengan cara metode individual dan kelompok. Sedangkan tujuan dari Bimbingan dan Penyuluhan Islam ialah membantu mengatasi kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan seluruh unsur yang terkait dapat membantu menanggulangi kemiskinan tersebut. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis dengan menggunakan pendekatan individual maupun kelompok, apa yang telah dicapai oleh Pihak PKH dalam langkah *preventif*, *kuratif*, *preservatif*, dan *developmental* sudah terlaksana sesuai dengan SOP PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, meskipun pencapaiannya belum sempurna.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisa proses Program Pelaksanaan Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, penulis dapat memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan, sebagaimana berikut:

1. Penulis menyarankan agar peran pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yakni dengan mempersiapkan pendamping yang lebih banyak (matang atau inisiatif), sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.
2. Melihat adanya perubahan dari penerima manfaat PKH, penulis berharap penerima tetap serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran

aktifnya dalam proses berjalannya program diskusi maupun pertemuan yang sifatnya mendukung.

3. Keberhasilan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah, dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, berani berkorban meluangkan waktu, pemikirannya, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif. Karena peranan Pemerintah Daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan motivasi terhadap RSTM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi berikutnya serta kordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Isep Zainal. 2009. *Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faqih, Ainurrahim. 2000. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hadi. Sutrisno. 2004. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kemensos RI. 2015. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta
- Margono, S. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Musnamar, Tohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasikun, 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik*, Yogyakarta: UGM
- Nurikhsan, Ahmad Juntika. 2006. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Netisulistiani. <http://netisulistiani.wordpress.com>site: (diakses pada 28 september 2017. Pukul 21.19 WIB).
- Operator PKH Kota Semarang. 2017. Kota Semarang
- Prayitno, & Erna Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rustam, Dahar. 2012. *Pemberdayaan Kaum Dhu'afa Melalui Zakat*. *Jurnal Dimas*, 12 (2), 257-261
- Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Ombak
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soewaji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: MITRA WACANA MEDIA
- Solotrust. <http://solotrust.com/read/1004/Dapat-Tambahan-PKH-Jumlah-Warga-Miskin-di-Jateng-Bertambah>: (diakses pada 13 oktober 2017. Pukul 10.59)
- Sutoyo, Anwar. 2017. *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori dan Praktek)*. Semarang: Prima Cipta Nusantara
- Winkel, W.S & M.M, Sri Hastuti.2004. *Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi
- Umary, Barmawie. 1980. *Azaz-azaz Ilmu Dakwah*. Semarang: CV. Ramadhani

Daftar Wawancara I (Koordinator Kota Semarang)

Nama : Aldo Fitra Romansya, SE
Usia : 29 Tahun
Pendidikan : S.I
Jabatan : Koordinator PKH tingkat Kota Semarang

1. Sejak kapan anda bertugas di PKH Kota Semarang ini?

“Sejak bulan September 2013 Mbak”

2. Berapa jumlah penerima bantuan PKH yang ada di Kecamatan Ngaliyan?

“Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Ngaliyan di tahun 2017 sebesar Rp. 732.000.000 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.408 keluarga penerima manfaat Mbak”.

3. Bagaimana gambaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“PKH merupakan program bantuan bersyarat yang digalakan oleh Kementerian Sosial. Bantuan ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan. PKH sendiri dilaksanakan di Kecamatan Ngaliyan semenjak tahun 2013 hingga sekarang Mbak.”.

4. Bagaimana cara koordinasi pendamping program keluarga harapan yang selama ini dilakukan?

“Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini pertama itu pembentukan Tim koordinasi PKH di tingkatan Kota Semarang setelah itu melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Kota Semarang, kepada aparat pemerintah dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosialisasikan akan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di tingkatan masing-masing Kecamatan yang berada di Kota Semarang Mbak”.

5. Siapakah sasaran dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Sasaran utama PKH adalah rumah tangga sangat miskin Mbak (RTSM), artinya kategori masyarakat miskin yang paling tidak mampu Mbak. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat Mbak. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Mbak. Peserta yang telah terdata kemudian cek kelapangan untuk melihat keadaan peserta yang sebenar-benarnya. Hal ini bertujuan agar bantuan ini tepat sasaran. Meskipun yang terjadi dilapangan masih ada penerima yang seharusnya tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan ini. Karena data PKH ini kita terima dari pusat langsung melalui BPS Mbak, jadi kita tidak terlibat langsung. Setelah mendapatkan data fix baru kita ketahap selanjutnya, yakni pertemuan awal. Pertemuan awal ini melibatkan beberapa pihak termasuk aparat desa. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan informasi sedetail mungkin mengenai PKH ini kepada masyarakat penerima bantuan. Tahap selanjutnya pencairan bantuan tahap pertama setelah itu verifikasi komitmen. Setelah verifikasi komitmen pendamping PKH akan memantau secara kontinu apakah peserta memenuhi keajibannya sebagai penerima bantuan. Apabila melanggar maka peserta tersebut bisa saja dibatalkan menjadi penerima bantuan dengan beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan Mbak”.

Daftar Wawancara Koordinator dan Pendamping PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Nama : Risma Anik Mahmudah, S.I.Kom
Usia : 32
Pendidikan : S.I
Jabatan : Koordinator dan Pendamping Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Sejak kapan anda menjadi koordinator dan pendamping PKH di Kecamatan Ngaliyan?

“Sejak Tahun 2013 Mbak”

2. Apakah Ibu sebagai koordinator dan pendamping sudah memahami dengan jelas mengenai PKH ?

“Tentunya saya memahami dengan jelas mengenai program ini karena kita melaksanakan PKH ini berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan juga kami sebagai pelaksana di Daerah diberikan panduan umum mengenai PKH Mbak, panduan operasional kelembagaan PKH, pedoman pengaduan, pedoman pembayaran bantuan. Tidak hanya berupa buku para pelaksana PKH ini juga sebelumnya ada diberikan pelatihan, namanya Bimbingan Teknis (BIMTEK) Mbak”.

3. Bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Kami sebagai pendamping PKH ketika ingin menyalurkan uang dari pemerintah ke tangan peserta, kita para pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak bank Mbak, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, jadi jikalau pada waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing untuk menghindari penumpukan antrian, sebelum itu pendamping juga berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan dana tersebut pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu Mbak”

4. Apa saja program-program pemberdayaan kelompok peserta PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Untuk kecamatan Ngaliyan sudah ada program pemberdayaan ekonomi Mbak. Program pemberdayaan ini bertujuan supaya ada keterampilan dari ibu-ibu agar mampu menunjang ekonomi keluarganya Mbak”. Jadi gini, penerima manfaat itu tidak melulu menerima bantuan uang tunai saja, tetapi pemerintah juga membekali ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri. Ketrampilan-ketrampilan itu seperti membuat krupuk bawang, donat dan daur ulang plastik bekas menjadi tas dan lain sebagainya. Untuk mempermudah pelatihan ketrampilan peserta PKH dibuat berkelompok, atau kelompoknya terdiri dari sepuluh sampai limabelas orang. Adapun tempat prakteknya kita setuju bersama-sama kelompok untuk menempati rumahnya peserta secara bergantian. Modal dari pelatihan itu, peserta harus iuran per masing-masing peserta, ketika sudah terbentuk seperti PKH Kecamatan Ngaliyan membuat ketrampilan kerupuk bawang selanjutnya di bekali cara memasarkannya agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung pada uang pemerintah. Kemudian, pelatihan itu sendiri dilakukan setiap dua minggu sekali Mbak”.

5. Sejauh mana pengaruh kelompok pemberdayaan peserta PKH dalam kemandirian RTSM?

“Sebenarnya tujuan pemberdayaan ini sangat bagus. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pengurangan masyarakat miskin Mbak. Namun, karena keterbatasan anggaran sehingga tidak semua Kecamatan dapat melakukan program pemberdayaan ini Mbak”.

6. Daftar Wawancara Koordinator PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Nama : Rini Setyowati, Am.Keb
Usia : 31
Pendidikan : D3
Jabatan : Pendamping PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Sejak kapan anda sebagai pendamping PKH di Kecamatan ini dan apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PKH Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Sejak tahun 2013 Mbak. Terkait sarana dan prasarana PKH di Kecamatan Ngaliyan terdiri dari: Kantor kesekretariatan, Komputerisasi (laptop, komputer, spiker, printer, scanner, LCD (Liquid Crystal Display)) sebagai alat pendukung dalam penyampaian materi *family devolepment session* (FDS), stiker, spidol, papan tulis, modul, dan buku pintar”.

2. Siapakah sasaran dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Sasaran utama PKH adalah masyarakat sangat miskin agar mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat Mbak, jadi kita pelaksana di daerah hanya tinggal menjalankan program ini sebagaimana mestinya. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS), jadi kami tidak ada hak untuk menambah atau mengurangi penerima PKH apabila memang mereka berhak mendapatkan bantuan PKH ini. Setelah pemilihan peserta barulah kami mengecek kelengkapan apakah benar data tersebut benar adanya. Setelah mendapatkan data fix baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu pertemuan awal. Pertemuan awal ini bertujuan untuk memberikan informasi sedetail mungkin mengenai PKH ini kepada masyarakat penerima bantuan. Tahap selanjutnya pencairan bantuan tahap pertama setelah itu verifikasi komitmen. Setelah verifikasi komitmen kami selaku pendamping

melihat apakah peserta memenuhi keajibannya sebagai penerima bantuan, apabila melanggar maka peserta tersebut bisa saja dibatalkan menjadi penerima bantuan dengan beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan”.

3. Bagaimana proses sosialisasi tahapan pertemuan awal setelah penetapan data penerima bantuan PKH yang terjadi di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Proses sosialisasi PKH ini berjenjang mulai pusat ke Kabupaten kemudian dari Kabupaten ke Kecamatan ke Desa baru ke sasaran penerima PKH Mbak. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai manfaat PKH itu sendiri. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan secara berkelompok Mbak. Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran PKH itu diberikan kepada penerima manfaat Mbak”.

4. Bagaimana prosedur perekrutan pelaksana PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Proses prekrutannya sama seperti CPNS Mbak. Pertama kami dihubungi oleh Kementerian Sosial bahwa ada program PKH masuk ke Kabupaten Ngaliyan dan membutuhkan sekian pendamping (jumlahnya ditentukan Kementerian Sosial) setelah itu kami umumkan ke setiap Kecamatan yang dibutuhkan. Nah, proses selanjutnya itu langsung ditangani oleh orang Kementerian Sosial langsung Mbak”.

5. Bagaimana cara menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan kepada penerima manfaat?

“Kami sebagai pendamping PKH ketika mau menyalurkan uang dari pemerintah ke tangan peserta, kita para pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak bank lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, jadi, jikalau pada waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing untuk menghindari penumpukan antrian, sebelum itu juga pendamping

berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan dana tersebut pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu Mbak”.

6. Apakah Ibu sebagai koordinator pendamping sudah memahami dengan jelas mengenai PKH?

“Kami melaksanakan program ini sesuai panduan dan TUPOKSI yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami juga diberikan beberapa buku panduan umum baik mengenai PKH secara umum, kelembagaannya, proses pencairan bantuannya dan panduan-panduan lain baik tertulis maupun melalui Bimbingan Teknis (BimTek) Mbak.”

7. Apakah Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sudah mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan?

“Saya rasa sudah Mbak, namun belum maksimal. Hal ini juga dikarenakan banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Karena pada dasarnya pelaksanaan program-program bantuan sosial ini banyak sekali kendalanya. Seperti dana yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya Mbak”.

8. Apa saja program-program pemberdayaan kelompok peserta PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Kalau untuk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ada program pemberdayaan masyarakat miskin yaitu bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang diberikan kepada penerima manfaat Mbak. Dengan memberikan bantuan secara non tunai dan pemberian bekal dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bantuan non tunai tersebut guna membantu pembiayaan sekolah dan jaminan kesehatan. Jadi, penerima manfaat itu tidak melulu menerima bantuan uang saja Mbak, akan tetapi pemerintah juga membekali ketrampilan untuk peserta PKH agar mereka itu dapat hidup mandiri, oleh karena itu, pemberian ketrampilan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya, ketrampilan-

ketrampilan itu seperti membuat krupuk bawang, donat dan daur ulang plastik bekas menjadi tas, daur ulang dari plastik bekas bungkus kopi, pembuatan snack-ringan, dan pembuatan pernak-pernik lainnya Mbak. Untuk mempermudah pelatihan ketrampilan peserta PKH dibuat berkelompok, atau kelompoknya terdiri dari sepuluh sampai limabelas orang. Adapun tempat prakteknya kita setuju bersama-sama kelompok untuk menempati rumahnya peserta secara bergantian. Modal dari pelatihan itu peserta harus iuran per masing-masing peserta, ketika sudah terbentuk seperti PKH kec. Ngaliyan membuat ketrampilan kerupuk bawang selanjutnya di bekali cara memasarkannya agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung pada uang pemerintah. Kemudian, pelatihan itu sendiri dilakukan setiap dua minggu sekali”.

9. Adakah Standard Operating Procedures (SOP) pelaksanaan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Ada, setiap program itu ada petunjuk pelaksanaannya agar kita melaksanakan program itu tidak melenceng dari peraturan yang ditetapkan Mbak”.

10. Bagaimana pola pendampingan penerima manfaat program keluarga harapan yang ada di Kecamatan Ngaliyan?

“Untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar cepat ketika ada kumpul-kumpul dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan itu ada ketua, sekretaris dan bendahara, biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat Mbak. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan Mbak”.

11. Bagaimana cara verifikasi komitmen yang selama ini dilakukan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan?

“Kalau untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan, keluarga yang masih duduk dibangku sekolahan kami pantau disekolahnya setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinanya dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan kalo bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat. Itulah pengawalan yang dilakukan pendamping PKH mbak agar peserta PKH dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh PKH Mbak”.

12. Bagaimana cara mengatasi ketika ada perubahan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan?

“PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi, data yang asalnya 20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapat PKH hanya nenek saja. Jika, suatu saat neneknya meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan PKH yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dan juga PKH selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal Mbak”.

13. Sejauh mana pengaruh kelompok pemberdayaan peserta PKH dalam kemandirian RTSM?

“Pengaruhnya sangat besar, karena dengan adanya program pemerdayaan ini masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dan membuat suatu kegiatan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri Mbak”.

14. Apa saja kendala pelaksanaan PKH di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Meskipun PKH ini sudah berjalan baik di Kecamatan Ngaliyan Mbak, namun tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk program ini merupakan kendala utama dalam pencapaian tujuan secara maksimal dan kurangnya tenaga pendamping Mbak. Semua program akan berjalan dengna baik jika anggaran cukup. Tidak hanya masalah dana, kendala lainnya yang kami alami adalah masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan. Hal ini dikarenakan data Penerima PKH itu murni dari pemerintah pusat Mbak, jadi kami sebagai pelaksana di daerah hanya mengecek kembali data yang diberikan oleh pusat. Jadi, jikalau ada yang tidak terdata kami tidak tahu Mbak.

Daftar Wawancara Informn I (Pengangkut Sampah)

Nama : Rumiwati

Usia : 43

Pendidikan : SD

Menerima Bantuan :

1. Sejak kapan anda menjadi penerima dan bagaimana gambaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat dengan tujuan membantu kami para peserta PKH untuk menyekolahkan anak dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita. Sehingga anak-anak kami tidak putus sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup Mbak”.

2. Apakah Anda sebagai masyarakat sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan itu?

“Kalau untuk prosedur detail saya kurang paham Mbak, karena pendamping juga tidak menjelaskan dengan detail tentang prosedur program PKH ini Mbak, saya hanya mengikuti instruksi dari ketua dan pendamping saja. Kalau kata ketua pencairan ya saya ke kantor pos, kalau kata ketua perkumpulan kelompok saya datang. Cuma prosedur seperti itu yang saya tau. Bahkan saya pernah menerima bantuan tidak sesuai dengan seharusnya, tetapi saya tidak tau apa penyebabnya, apakah karena anak saya tidak masuk sekolah atau bagaimana saya kurang tau Mbak.

3. Apakah hasil yang telah dicapai program ini, sudah dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Saya rasa belum Mbak, meskipun agak terbantulah dengan adanya program ini, setidaknya beban kami yang tergolong miskin ini sedikit berkurang Mbak”.

4. Apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya?

“Ya mungkin sudah Mbak, karena kalau tidak sesuai kebijakan pasti di tangkap atau diberi sanksi”.

5. Apakah program ini telah memberikan keuntungan kepada keluarga sangat miskin (target group)?

“Sangat memberikan keuntungan. Dengan adanya bantuan PKH ini kebutuhan sekolah anak saya seperti baju sekolah, sepatu, buku tulis bisa terpenuhi Mbak, karena sekolah-kon butuh perlengkapan juga, jadi saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Apalagi anak saya sekolah di sekolah swasta, karena anak saya dikeluarkan secara sepihak dari sekolah lamanya karena saya tidak mampu membayar uang les-nya meskipun sekolahnya negeri. Ditambah lagi suami saya tidak ada kerjaan. Jadi saya sangat bersyukur pemerintah mengadakan program PKH ini”.

6. Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini?

“Saya rasa belum banyak pencapaian program ini, hanya pendidikan dan kesehatan anak sedikit terbantu. Tetapi untuk mengurangi tingkat kemiskinan belum maksimal Mbak.

7. Fasilitas apa sajakah yang di peroleh peserta penerima PKH di bidang pendidikan?

“Bantuan ini berupa uang tunai, jadi kita yang mengatur sendiri kebutuhan anak di bidang pendidikan itu apa, misalnya baju sekolah, tas, sepatu, dan lain sebagainya”

Data Informan II (Pengangkut Sayur)

Nama : Wagirah

Usia : 51

Pendidikan : SD

Menerima Bantuan :

1. Sejak kapan anda menerima bantuan dari PKH dan bagaimana gambaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat untuk membantu kami para peserta PKH untuk menyekolahkan anak dan juga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita Mbak”.

2. Apakah Anda sebagai masyarakat sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan itu?

“Kalau untuk prosedur detail saya kurang paham, karena pendamping juga tidak menjelaskan dengan detail tentang prosedur program PKH ini Mbak, saya hanya mengikuti instruksi pendamping saja. Kalau kata pendamping saya ke kantor pos, saya datang Mbak. Cuma prosedur seperti itu yang saya tau Mbak”.

3. Apakah hasil yang dicapai dari program ini sudah sesuai dengan tujuan awalnya, terutama di bidang pendidikan ?

“saya rasa sudah Mbak, dan saya sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari PKH ini mbak, dengan bantuan ini anak saya dapat melanjutkan sekolahnya lagi yang dulu sempat terputus waktu kelas 4 SD dikarenakan keterbatasan kami untuk membiayai anak-anak saya. Kebetulan saya tidak mendapatkan bantuan untuk kesehatan Mbak, tetapi yang saya lihat mereka yang mendapatkan bantuan di

bidang kesehatan lebih rajin memeriksa kesehatannya ibu hamil dan balitanya ke posyandu Mbak”.

4. Apakah hasil yang telah dicapai program ini, sudah dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Saya rasa belum, meskipun sudah terbantulah dengan adanya program ini Mbak”

5. Apakah program ini telah memberikan keuntungan kepada keluarga sangat miskin (target group)?

“Sangat memberikan keuntungan. Dengan adanya bantuan PKH ini kebutuhan sekolah anak saya seperti baju sekolah, sepatu, buku tulis bisa terpenuhi, karena sekolah membutuhkan perlengkapan juga Mbak, jadi, saya sangat terbantu dengan adanya program ini Mbak”.

6. Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini?

“Saya rasa belum banyak pencapaian program ini, hanya pendidikan dan kesehatan anak sedikit terbantu. Tetapi untuk mengatasi kemiskinan saya rasa belum maksimal Mbak”.

7. Fasilitas apasaja yang di peroleh peserta penerima PKH di bidang pendidikan?

“Bantuan ini berupa uang tunai Mbak, jadi kita yang mengatur sendiri kebutuhan anak di bidang pendidikan itu apa, misalnya baju sekolah, tas, sepatu, dan lain sebagainya Mbak”.

Data Informan III (Buruh Cuci)

Nama : Tasriyatun dan Sugiarti
Usia : 30 dan 41
Pendidikan : SMP dan SD
Menerima Bantuan :

1. Bagaimana gambaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

“Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat untuk membantu kami para peserta PKH untuk menyekolahkan anak-anak Mbak. Sejauh ini pelaksanaan program di Kecamatan Ngaliyan sudah terlaksana dengan baik Mbak. Meskipun setiap program penanggulangan kemiskinan tidak mudah dalam pelaksanaannya Mbak”.

2. Apakah hasil yang dicapai dari program ini sudah sesuai dengan tujuan awalnya, terutama di bidang pendidikan?

“ Saya rasa sudah Mbak, anak saya dua (2), laki-laki dan perempuan, tinggal satu yang masih duduk dibangku sekolahan dan yang satu sudah tamat SMA Mbak. Uang yang saya dapat dari buruh cuci saya tabungkan untuk biaya mendaftar kuliah anak saya Mbak. Saya pun bekerja tidak setiap hari mbak, hanya kalau mendapatkan panggilan saya baru kerja, kalau tidak ada panggilan saya dirumah dan *alhamdulillah*-nya mbak, dengan adanya bantuan dari PKH ini, biaya pendidikan anak-anakku terjamin Mbak”.

3. Apakah Anda sebagai masyarakat sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan itu?

“Kalau untuk prosedur detail saya kurang paham Mbak, karena pendamping juga tidak menjelaskan dengan detail tentang prosedur program PKH ini Mbak, saya hanya mengikuti pendamping saja”.

4. Apakah hasil yang telah dicapai program ini, sudah dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngaliyan?

“Secara pribadi, dengan adanya bantuan PKH ini merasa terbantu Mbak”.

5. Apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya?

“Ya mungkin sudah ya Mbak, karena kalau tidak sesuai dengan kebijakan pasti pelaksanaannya akan kacau balau Mbak dan juga akan menyebabkan masalah lain dikemudian hari Mbak”.

6. Apakah program ini telah memberikan keuntungan kepada keluarga sangat miskin?

“Sangat memberikan keuntungan Mbak. Dengan adanya bantuan PKH ini kebutuhan sekolah anak saya seperti baju sekolah, sepatu, buku tulis bisa terpenuhi Mbak, karena gaji suami saya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja Mbak”.

7. Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini?

“Saya rasa belum banyak pencapaian program ini Mbak, hanya pendidikan dan kesehatan anak sedikit terbantu Mbak. Tetapi untuk mengatasi kemiskinan saya rasa belum maksimal, hanya cukup terbantu Mbak”. Mungkin dalam jangka lama ekonomi keluarga saya akan lebih membaik Mbak”.

Lampiran II

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SOSIALISASI DAN KEGIATAN





Wawancara dengan pendamping program keluarga harapan (PKH)



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Shella yulia rosalina

TTL :Pati, 03 Juli 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Jimbaran, Kec. Kayen, Kab. Pati

Jenjang Pendidikan

MI : Miftahul Islamiyan Jimbaran

MTs : MTs Negeri Lasem Rembang

MA : Miftahul Ulum Trimulyo

S1 : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 09 Agustus 2018

Shella Yulia Rosalina

131111060